



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK
DAERAH PADA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008

Oleh :

HILDA YATI SARI
BP. 00 155 223

Mahasiswa Program S-1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



PADANG
2009

	No. Alumni Universitas	Hilda Yati Sari	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		
<p>a). Tempat/Tgl Lahir: Padang / 11 September 1979 b). Nama Orang Tua: Drs. Syamsurizal dan Afrida Letti c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 00 155 223 f). Tanggal Lulus: 13 Juni 2009 g). Predikat Lulus: Memuaskan h). IPK: 3,01 i). Lama Studi: 8 tahun j). Alamat Orang Tua: Komp. Perumahan UNAND Ulu Gadut Blok B2-03-03 Padang</p>			

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH
PADA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008**

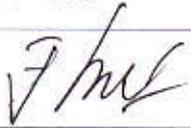
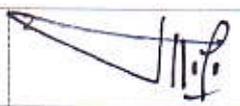
Skripsi S-1 oleh : **HILDA YATI SARI**, Pembimbing : **Drs. SUHANDA, M.Si.Ak**

ABSTRAK

Salah satu tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan melihat peningkatan nilai kekayaan daerah (barang milik daerah) baik dari segi kualitas maupun dalam kuantitasnya. Barang milik daerah merupakan salah satu indikator dalam laporan pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah yang tercantum dalam aktiva pada laporan keuangannya. Nilai aktiva tersebut tersaji dalam bentuk nilai buku saat ini. Agar diperolehnya data yang lengkap mengenai aktiva tersebut maka perlu adanya inventarisasi yang baik dan lengkap semua barang milik daerah yang ada.

Adapun objek penelitian yang diteliti ialah pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Solok saat ini dilakukan oleh suatu unit kerja setingkat bagian, yaitu Bagian Aset yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Pengelolaan tersebut meliputi ; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah. Pengelolaan tersebut meliputi ; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah. Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di unit kerja pengelola aset daerah Kabupaten Solok ini seperti pada Bagian Aset, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juni 2009 dengan penguji :

Tanda Tangan	1			3	
Nama Terang		Drs.H. Fauzi Saad, Akt	Drs. Jonhar, M.Si.Akt		Dra. Nini Syofriyeni, M.Si.Akt

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi :

Dr.H. YUSKAR, SE.MA.Ak
NIP.131 629 305


TANDA TANGAN

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama	Tanda tangan	
No. Alumni Universitas:	Nama	Tanda tangan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat otonomi bagi Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dimaksudkan agar Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh memberikan pelayanan yang prima dalam meningkatkan taraf hidup warga masyarakatnya, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi dan lain-lain, baik fisik maupun non fisik spiritual atau yang disebut pembangunan daerah secara keseluruhan disegala bidang yang diprogramkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat merupakan indikator penggerak dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menyusun program pembangunan haruslah didasarkan pada landasan berfikir yang realistis dan tepat dengan menyusun strategi yang tepat mengenai penjelasan arah dan sasaran pembangunan itu sendiri. Faktor-faktor yang mendasar dalam pemahaman konsep pembangunan salah satunya adalah pemahaman atas potensi ekonomi yang terukur.

Potensi ekonomi termasuk didalamnya harta kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Negara/Daerah yang meliputi segala benda yang bernilai ekonomi baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki / dikuasai oleh Negara / Daerah.

Salah satu tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan melihat peningkatan nilai kekayaan daerah (barang milik daerah) baik dari segi kualitas maupun dalam kuantitasnya. Barang milik daerah merupakan salah satu indikator dalam laporan pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah yang tercantum dalam aktiva pada laporan keuangannya. Nilai aktiva tersebut tersaji dalam bentuk nilai buku saat ini. Agar diperolehnya data yang lengkap mengenai aktiva tersebut maka perlu adanya inventarisasi yang baik dan lengkap semua barang milik daerah yang ada.

Untuk pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Solok saat ini dilakukan oleh suatu unit kerja setingkat bagian, yaitu Bagian Asset yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2004 tentang Struktur dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Bagian Asset ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan "mengelola barang milik daerah" yang berbentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, jasa dan potensi lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan tersebut meliputi ; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah. Disamping Bagian Asset yang berada di lingkup Sekretariat Daerah ini, pada Badan, Dinas, Kantor dan jajarannya terdapat pula unit pengelola barang milik daerah, di Kabupaten Solok terdapat 720 unit pengelola barang milik daerah yang berada pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian – bagian di Sekretariat Daerah dan jajarannya, belum termasuk pengelola barang milik daerah yang berada di pemerintahan nagari.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Solok tentang penerapan sistem akuntansi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2008, dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan sistem perencanaan, pembelian, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah dengan baik, sebagaimana yang telah di atur dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007.
2. Tidak adanya pembuatan ayat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup menyebabkan sistem akuntansi yang diterapkan hanyalah berupa pencatatan ke semacam jurnal umum yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.
3. Laporan akuntansi barang daerah Pemerintah Kabupaten Solok memiliki kelemahan sebagai berikut :
 - Penilaian barang milik daerah hanya dilakukan sekali empat tahun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga / konsultan sehingga sulit dijadikan bahan pengambil keputusan.
 - Tidak adanya dilakukan penyusutan tahunan atas barang milik daerah sehingga sulit untuk mengetahui berapa nilai efektif barang milik daerah pada akhir tahun.